TAJUK RENCANA

Kuatkan Kontrol Masyarakat Desa

DESAKAN para kepala desa kepada pemerintah untuk segera mengesahkan revisi Undang-undang Desa (UU Desa) akhirnya terwujud. Kamis (28/3) Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 6/2016 tentang Desa telah disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Semua ketentuan baru dalam perubahan kedua UU Desa pun langsung berlaku setelah diundangkan.

Di antara 7 point utama perubahan UU Desa, maka masalah jabatan kepala desa paling menjadi perbincangan. Hal tersebut diatur dalam point keempat, mengenai ketentuan pasal 39 yang mengatur masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun, dengan maksimal kepemimpinan selama dua periode. Di dalam ketentuan yang lama, kepala desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak pelantikan. Dengan maksimal masa kepemimpinan selama 3 periode. (KR, 30/3).

Keputusan perubahan UU Desa ini bak hujan di musim kemarau. Disambut gembira hamper seluruh kepala desa bahkan juga Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi). Inilah 'kemenangan' Apdesi. Aspirasi yang disampaikan Apdesi untuk merevisi UU Desa dengan memanfaatkan momentum pemilu, bisa dikatakan berhasil.

Apdesi mampu memanfaatkan momentum politik bernama pemilu. Kepala desa lewat Apdesi bisa 'menekan' legislator mengesahkan revisi UU Desa. Dengan strategi ini, desa tidak sekadar mendapat janji kosong. Bak *tukar guling* dalam bahasa Koordinator Divisi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Ghaliya Putri Sjafrina. Yang satu perlu perubahan UU Desa, yang lain butuh suara dalam pemilu. ìNuansa politisnya sangat jelas,î ujar Almas melihat respons positif pemerintah maupun DPR terhadap usulan ini.

Dengan 74.961 desa dan 8.506 kelurahan (Permendagri No 99/2019), desa hingga kini masih 'diselimuti' sejumlah persoalan. Mulai tata kelola keuangan yang ekslusif, partisipasi bermakna masyarakat hingga korupsi. Hal ini berakibat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa di banyak tempat, berjalan tidak optimal. Sehingga pascaperubahan UU Desa muncul harapan, paling tidak, kepala desa akan bisa lebih fokus dan serius memikirkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desanya.

Kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa ini akan terwujud bila kontrol masyarakat kuat. Tanpa kontrol yang kuat, perpanjangan masa jabatan kepala desa bisa tidak sesuai tujuan. Kekhawatiran menghambat regenerasi kepemimpinan desa dan menguatnya oligarkhi di tingkat desa menjadi problema krusial di antara dampak negatif yang harus diantisipasi. Perpanjangan masa jabatan kepala desa ini akan menghambat orang muda yang berkemampuan menjadi pemimpin dan berpikiran maju dengan pelbagai inovasinya, mendapatkan kesempatan memimpin.

Jika ini terjadi, berarti iklim demokrasi menjadi tidak sehat. Apalagi hal ini sejatinya bertentangan dengan semangat reformasi dan amandemen Konstitusi yang membatasi waktu kekuasaan eksekutif. Bahkan juga memunculkan kekhawatiran bila lolosnya perubahan UU Desa ini kelak akan menjadi 'pintu masuk' perubahan undang-undang lain tentang kekuasaan dan masa jabatan kepala daerah, presiden bahkan legislatif. (hukumonline, 27/2/2023)

Tentu kita tidak berharap itu terjadi. Mengingat desa-desa bukan hanya tempat tinggal sebagian besar penduduk Indonesia, tetapi juga motor penggerak pembangunan yang berkelanjutan. Desa adalah garda terdepan pembangunan. Perpanjangan masa jabatan semoga juga menghadirkan kepala desa yang amanah, berkualitas dan didukung masyarakat. Serta masyarakat baik lewat organisasi sosial, organisasi keagamaan, lembaga swadaya di tingkat desa, ikut aktif melakukan kontrol. ❑-f

Jalan Kultural Melawan Tengkes

Mukhotib MD

PROGRAM pencegahan tengkes atau stunting secara nasional masih belum memuaskan. Ada yang tepat, tengkes hanya ditempatkan sebagai persoalan medis, dan absen sisi kulturalnya. Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 menunjukkan prevalensi tengkes anak sebesar 21,6%. Sementara menurut standar WHO (Badan Kesehatan Dunia) mestinya berada di bawah angka 20%. Ini paradoks, di tengah-tengah klaim keberhasilan dan kemajuan pembangunan ekonomi dan kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, prevalensi tengkes secara nasional harus berada di angka 14% pada tahun 2024. Artinya, Indonesia mencitakan angka yang lebih rendah dibandingkan dengan standar WHO.

Pemerintah membutuhkan strategi jitu untuk mencapai target penurunan angka tengkes secara nasional. Tak hanya soal kerja-kerja kolaboratif, menyebar definisi, dan berbagai tindakan dalam kerangka pengetahuan medis. Lebih dari itu, pemerintah perlu memperluas pendekatan dalam menumbuhkan kesadaran warga mengenai dampak tengkes bagi anak-anak.

Jalan Kultural

Satu dari lima pilar utama penurunan kasus tengkes, peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat. Pilar ini menunjukkan upaya mengatasi tengkes dalam pendekatan kultural untuk mengubah perilaku, dan pendidikan publik. Termasuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dalam *Theory of Change* (ToC), perubahan tertinggi pendidikan publik bukanlah perilaku, melainkan kesadaran atau perubahan paradigmatik, perubahan perspektif. Perilaku hanya manifestasi dari terjadinya perubahan cara pandang dan sikap masyarakat dalam kehidupan keseharian.

Pendekatan budaya melawan tengkes dengan begitu berpijak dari perubahan perspektif masyarakat mengenai tumbuh kembang anak. Itu bukan takdir. Melainkan situasi yang diusahakan agar anak lebih baik lagi di masa depan.

Pertanyaannya, bagaimana bisa sampai terjadi perubahan perspektif, dan bisa mewujud dalam sikap dan perilaku keseharian? Ada dua langkah utama menjawab pertanyaan ini. *Pertama*, pada ranah peradigmatik dengan membongkar perspektif *gender* yang menempatkan perempuan pada posisi nomor dua dalam hampir semua domain sosial.

KR-JOKO SANTOSO

Penempatan ini menyebabkan perempuan tertinggal secara pengetahuan, utamanya pola pengasuhan dan perawatan, termasuk kesehatan. Bahkan, perempuan mendapatkan kesempatan terakhir mendapatkan makanan bergizi, setelah suami dan anak-anaknya.

Sistem dan praktik budaya ini mesti diubah dalam pencegahan tengkes. Bukan perkara sederhana, sebab harus mengubah sistem nilai dan norma yang sudah dianggap benar berabad-abad lamanya. Nilai yang secara terus menerus diproduksi di berbagai lokus kehidupan, termasuk praktik-praktik pendidikan di kampus dan sekolahan.

Kedua, perubahan ranah pengetahuan agar masyarakat bisa bersikap dan bertindak startegis dalam mengatasi tengkes. Pengetahuan kesehatan seksual dan reproduksi (pendidikan seksual komprehensif) akan mengatasi persoalan kesenjangan informasi tentang masa pubertas. Termasuk pernikahan, masa-masa hamil, saat menyusui, dan informasi mengenai tumbuh kembang anak.

Dimulai Usia Remaja

Dengan begitu, pemberian informasi dalam mengatasi tengkes harus dimulai pada usia remaja dengan memberikan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, dengan memandang susbtansinya. Tidak zamannya lagi melihat pendidikan kesehatan reproduksi sebagai tabu, dengan menilainya secara salah dan sempit, sebagai pendidikan hubungan seksual.

Sudah saatnya membuang jauh-jauh kekhawatiran tak beralasan. Pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi akan membuat remaja melakukan tindakan salah secara seksual. Misalnya, mendorong berpacaran dan melakukan hubungan seksual. Pendidikan kesehatan reproduksi justru menjadikan remaja bertanggung jawab. Memahami dirinya dengan benar, dan bisa mendewasakan usia perkawinan.

Informasi penting mengenai kesehatan seksual dan reproduksi ini harus terus disampaikan, misalnya melalui kursus calon pengantin, di setiap keluarga, sekolah dan kampus. Dengan begitu cara pandang, sikap dan perilaku yang mendukung agenda melawan tengkes benar-benar menjadi kebiasaan yang pada akhirnya akan menjadi budaya masyarakat. ❑-f

*) ***Mukhotib MD**, Direktur Yayasan Studi dan Pengembangan Sosial-Keagamaan (YSPSK) Magelang*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Ironi Tawuran di Bulan Ramadan

Arifah Suryaningsih

TAWURAN remaja yang belum lama terjadi tentu mengusik ketenangan warga. Kejadian ini juga marak di beberapa kota/daerah lain, yang bahkan 'perang sarung' di Lampung telah menyebabkan satu remaja kehilangan nyawanya. Bulan Ramadan, yang dianggap sebagai bulan suci bagi umat Islam, seharusnya disambut dengan semangat ibadah, introspeksi, dan juga penguatan solidaritas melalui berbagai aksi sosial. Namun masih ada beberapa remaja yang terjerumus dalam pertikaian tanpa guna. Fenomena ini perlu perhatian serius, bagi orang tua, guru maupun orang dewasa di sekeliling mereka.

Miris, ketika mengira bahwa anak kita baik-baik saja, namun ternyata dia adalah bagian dari kelompok tersebut. Pendidikan moral dan agama yang kuat tanpa kontrol, komunikasi dan pendampingan dalam keluarga bisa membuka peluang 'kecolongan', pada era dimana arus informasi dan komunikasi begitu liar. Beberapa konteks sosial lain yang mungkin memicu perilaku negatif tersebut bisa karena rapuhnya kondisi perekonomian keluarga.

Pemicu Konflik

Ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya dan akses terhadap nilai-nilai sosial merupakan pemicu konflik. Pada konteks tawuran remaja, konflik bisa muncul karena persaingan atas wilayah, reputasi, atau bahkan bisa jadi hanya berasal dari hal sepele, bentuk ekspresi dari ketidakpuasan yang mungkin muncul dari ketegangan sosial sehari-hari. Sementara remaja secara individu masih cenderung mencari identitas positif dengan membandingkan diri mereka dengan kelompok lain dalam masyarakat.

Beberapa studi psikologis menunjukkan bahwa terlibat dalam tawuran atau konflik fisik dapat memiliki dampak yang signifikan pada kesejahteraan mental. Penelitian Smith dan Jones (2019) menemukan bahwa remaja yang sering terlibat dalam tawuran cenderung mengalami tingkat stres yang lebih tinggi, kecemasan, dan depresi dibandingkan dengan remaja yang tidak terlibat dalam tawuran. Konflik fisik seperti tawuran dapat memicu reaksi *fight-or-flight* dalam sistem saraf, yang dapat mengakibatkan peningkatan kadar hormon stres dalam tubuh. Selain itu, terlibat dalam tawuran juga dapat merusak harga diri dan citra diri. Remaja yang terlibat dalam tawuran mungkin mengalami perasaan bersalah, malu, atau bahkan penolakan dari kelompok sosial mereka.

Holistik

Mengatasi masalah tawuran remaja selama bulan Ramadan memerlukan pendekatan yang holistik, yang tidak hanya fokus pada penanganan konflik fisik, tetapi juga memperhitungkan kesejahteraan mental remaja yang terlibat. Beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan antara lain: *Pertama* berangkat dari pendidikan keluarga. Orangtua perlu berperan aktif dalam memberikan contoh dan membimbing anak-anak mereka dalam menangani konflik dengan cara yang positif dan produktif. *Kedua*, melibatkan mereka pada komunitas/jaringan sosial positif. Kegiatan-kegiatan sosial, seperti remaja masjid, karang taruna, dapat menjadi tempat bagi mereka untuk mengekspresikan diri dan memperoleh dukungan sosial yang diperlukan.

Ketiga, layanan konseling. Menyediakan layanan konseling atau dukungan psikologis bagi remaja yang terlibat dalam tawuran atau mengalami dampak psikologis dari konflik fisik. Hal tersebut diharapkan dapat membantu mereka mengatasi masalah emosional dan meningkatkan kesejahteraan mental mereka. *Keempat*, penegakan hukum yang tegas. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tawuran perlu diterapkan untuk mencegah terulangnya kekerasan fisik dan mengirimkan pesan bahwa perilaku tersebut tidak akan ditoleransi dalam masyarakat.

Tawuran remaja selama bulan Ramadan bukan hanya masalah fisik, tetapi juga masalah kesejahteraan mental yang serius. Dengan memahami dampak psikologis dari konflik fisik, dan menerapkan beberapa tawaran solusi diatas kita boleh berharap bahwa insiden tawuran remaja akan bisa dicegah/dikurangi. ❑-f

*) ***Arifah Suryaningsih SPd MBA,** Guru SMK N 2 Sewon, Mahasiswa S3 FIPP UNY*

PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Bapak Ibu, Perketat Pengawasan pada Anak

ANAK adalah amanah. Meski Kahlil Gibran dalam salah satu puisinya menyebut *anakmu bukan anakmu // .... // dan meskipun mereka bersamamu, mereka bukan milikmu// ...* Namun sebagai amanah, anak adalah titipan Allah yang terlahir suci bersih. Orang tua lah yang berkewajiban mendidik dan menjadikan mereka menjadi baik.

Maka hati-hatilah orang tua menjaga titipan Allah tersebut. Sedih mendengar di bulan Ramadan ini mendengar anak-anak tawuran. Anehnya ini terjadi di pelbagai daerah. Atau terjadi di Magelang, berkedok bukber tapi malah pesta miras. Ini cukup menggelisahkan. Karena itu bapak ibu, perketat pengawasan pada anak-anak, tanpa membuat mereka terbelenggu. Jaga amanah Allah, karena itu akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. ❑-f

*) ***Dra Estiningsih,** Kusumanegara Yogyakarta*

Jangan Abai Keamanan di Hari Lebaran

LEBARAN, banyak perumahan terutama yang ditinggali pasangan mudah, akan sepi di siang hari. Banyak yang pada waktu siang ditinggal warganya. Mungkin mereka mengunjungi kerabat atau mudik ke kediaman orang tua. Atau juga beristirahat dan *hang out* bersama keluarga.

Yang perlu menjadi perhatian, jangan abai keamanan di Hari Lebaran. Mungkin perlu ada penjagaan khusus dengan menggalakkan Jaga Tangga atau Jaga Warga. Sebelum mudik, mungkin lingkungan RT atau RW bisa mengkoordinir keamanan perumahan. Sehingga semua nyaman merayakan Lebaran. ❑-f

*) ***Arin,** Wedomartani Ngemplak Sleman*

Pojok KR

Jabatan kades 8 tahun, maksimal 2 periode

-- Semoga tidak menghadirkan 'dinasti desa'

***

Sleman mempercepat penambalan jalan berlubang

-- Demi menyambut pemudik

***

Kulonprogo, calon percontohan kabupaten antikorupsi

-- Semoga benar-benar jadi contoh

Berabé

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. **ISSN:** 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB.
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **General Manager :** H Yoeke Indra Agung Laksana, SE. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Dra Hj Fadmi Sustiwi, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.